

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan atau administrasi publik, di dalam pengelolaanya harus dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik (pertanggungjawaban publik) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan juga mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Sebagai aparat instansi pemerintah juga harus mampu mengemban apa yang telah diamanatkan masyarakat luas agar tercipta keselarasan dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan instansi. Salah satu cara untuk mengatur kinerja instansi pemerintah adalah dengan membuat laporan tentang kinerja instansi pemerintah agar tergambar bagaimana mereka menjalankan pemerintahan (Yani, 2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebutkan salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Salah satu cara untuk menilai akuntabilitas disuatu pemerintahan daerah yaitu dengan cara melihat kinerja pemerintah itu sendiri. Salah satu cara untuk menilai akuntabilitas disuatu pemerintahan daerah yaitu dengan cara melihat kinerja pemerintah itu sendiri. Kinerja (*performance*) adalah gambaran keberhasilan dari kegiatan atau program atau kebijakan yang dilandasi dalam sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi untuk mewujudkan cita-cita suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada masyarakat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu program atau aktivitas yang telah dilakukan (Bastian, 2017).

Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi sistem ini diterapkan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assessment* berarti tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah serta melaporkannya pada instansi yang lebih tinggi. Dengan diterapkannya akuntabilitas perlu dilakukan evaluasi sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dengan proses pengevaluasian diukur melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Wardhana et al, 2015).

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah alat yang di gunakan untuk melaksanakan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu dari prasyarat untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dan juga terpercaya tentunya (Setyowati & Isthika, 2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selanjutnya diperiksa dan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dibawah koordinasi Kementrian PAN dan RB (Suharyanto dan Sutaryo, 2016).Evaluasi LAKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi AKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi pemerintah sesuai dengan prioritas program pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diberikan kewenangan lebih untuk berperan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa APIP dapat mendorong pencapaian kinerja pemerintah menjadi lebih baik, yang nantinya kinerja tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada

pemerintah pusat dan masyarakat. APIP melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan (Pasal 28). Selain itu, berdasarkan kewenangannya APIP juga melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja (Pasal 29). APIP merupakan aparat profesional yang memiliki sertifikat auditor dengan pemahaman mendalam tentang budaya bisnis organisasi, sistem, dan proses audit. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, auditor internal diharapkan untuk mengikuti Standar Audit baik Standar Internasional maupun Standar Audit yang berlaku untuk APIP, serta wajib mematuhi Kode Etik Profesi. Berdasarkan hal itu peran APIP sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan, sasaran organisasi, dan kinerja suatu pmda secara maksimal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan (Suharyanto dan Sutaryo, 2016).

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya temuan BPK RI atas dugaan kebocoran anggaran atau lebih bayar pada Pemerintah Kota Bandar Lampung sekitar Rp5,1 miliar. Progres pengembalian lebih bayar tersebut mencapai 75,74 persen dari rekomendasi Rp5,1 miliar. Artinya, sekitar Rp1,27 miliar anggaran masih menguap lantaran belum dikembalikan. Temuan atas kelebihan pembayaran jasa kontruksi, jasa konsultan, maka wali kota agar mengintruksikan kepada kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU agar segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 60 hari sejak tanggal laporan pemeriksaan BPK RI diserahkan (www.matalampung.com, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Manfaat Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan

keuangan pemerintah (Bastian, 2017). Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful* (Adhidan Suhardjo, 2013).

Sedangkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2017 tentang SAP, pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Pada umumnya, Pemerintah Daerah belum menyiapkan peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya rencana pengembangan sistem atau aplikasinya serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan kerja. Setiap daerah, harus siap menerapkan SAP berbasis akrual. Jika tidak, opini BPK terhadap LKPD bisa turun (Azis, 2014 dalam BPKRI, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Reyhan (2017) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2020) standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sawahlunto.

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/ lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan

keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumberdaya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kurniawan, 2013). Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Rasdianto, 2013).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbang yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Darise, 2018). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2018). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani Dan Herawati (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reyhan (2017) menyatakan bahwa variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu kunci agar pelayanan operasional yang diterapkan pada instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan efisien adalah menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen atau yang sering disebut dengan sistem pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah perlu merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah

membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem tersebut disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Noviyana & Pratolo, (2018).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu sistem pengendalian intern sangatlah penting dilakukan dalam kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Mattoasi, (2021) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2019) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Reyhan (2017) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), dimana hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbedaan penelitian ini adalah yang pertama menambahkan variabel sistem pengendalian intern dari penelitian yang dilakukan oleh Mattoasi (2021), dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka kinerja pemerintah juga semakin baik. Kedua mengganti objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul *“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung)”*.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Adapun objek penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Waktu yang ditentukan pada penelitian ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen agar dapat digunakan sebagai referensi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi dan integritas karyawan sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan.
3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya pengembangan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan serta sistem penengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di sajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III:METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang di lakukan.hasil-hasil statistic di interprestasikan dan pembahasan di kaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Padabab initerdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**